

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGANAN LINGKUNGAN KUMUH PERKOTAAN (STUDI PADA PELAKSANAAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) DI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KABUPATEN PONOROGO)

Oleh

Dian Meriyana Hastuti

Abstract

The Implementation of Community-Based Settlement Environment Structuring of the City without Slums Program in Ponorogo Regency also cannot be separated from good collaboration between the community, the government, the private sector and other stakeholders. This slum handling cannot be handled if only done by one or two parties, but requires the participation of various parties or stakeholders who collaborate collaboratively. This study aims to determine the process of Collaborative Governance in the Implementation of Community-Based Settlement Environmental Structuring in the Slumless City Program in Ponorogo Regency. The theory used includes the theory of good governance, the process of collaboration, environmental development and the concentration of City Without Slums. Data collection techniques were carried out by interviewing and observing the informants using the purposive sampling method. The data analysis technique is done by descriptive method. The conclusion of this research is that the collaborative governance process has been carried out well starting from the dynamics of Collaboration, Collaborative Actions, and the Temporary Impacts and Temporary Adaptations of the Collaboration Process. Most of it is done in the form of participation at all stages of development.

Keywords: Collaborative Governance, City Without Slums Program, Proses

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Berdasarkan undang-undang tersebut serta dengan memperhatikan

cita-cita bangsa dan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Oleh karena itu, DJCK (Direktorat Jendral Cipta Karya)

menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Yolanda, 2018 : 21).

Secara kelembagaan Program Kota Tanpa Kumuh memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di semua Kelurahan Dampungan yang bersifat *kolektif kolegal* serta memiliki unit-unit diantaranya unik pengelola keuangan, unit pengelola sosial dan unit pengelola lingkungan. Dalam pelaksanaan pengentasan kumuh sebagaimana telah tertulis di dalam kebijakan yang ada harus dilaksanakan melalui partisipasi penuh dari masyarakat dan kolaborasi dengan semua pihak (*stakeholders*) yang ada di semua tingkatan.

Prinsip setiap kegiatan harus dilakukan dengan kolaborasi semua pihak. Rosyida, Dkk (2019 :7) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan perjanjian timbal balik dan sukarela antara dua atau lebih lembaga sektor publik yang berbeda, atau antara entitas publik dan swasta atau nirlaba, untuk memberikan pelayanan pemerintah. Dalam konteks program Kota Tanpa Kumuh kolaborasi dilakukan antara masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat, tenaga pendamping sebagai wakil dari konsultan, pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar terjadi akselerasi dan juga kesesuaian arah program antara yang dikehendaki masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan dan pemerintah Kabupaten (Rosyida, Dkk. 2019 :32).

Pelaksanaan PLPBK (Penataan Lingkungan Perkotaan Berbasis

Komunitas) Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Ponorogo juga tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, pihak swasta dan para pemangku kepentingan lainnya. Penanganan kumuh ini tidak bisa ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta berbagai pihak atau *stakeholders* yang secara bersama-sama melakukan kolaborasi (*collaboration*). (Sudarmo, Dkk. 2019 : 13).

Keterlibatan berbagai elemen dalam penanganan kumuh ini merupakan pelaksanaan dari prinsip *collaborative governance* yang dimaknai sebagai bersatunya institusi publik dan pihak terkait *non-pemerintah* dalam proses pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasi yang hasilnya ditanggung bersama dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Model *governance* ini dicirikan, antara lain adanya kesetaraan di antara *stakeholders*, sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan administratif (konsensus), kendati struktur formal, tetap lentur dan cenderung sederhana, dan fokus terhadap penyelesaian kebijakan dan program secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Pada Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru yang memiliki popularitas belum lama, metode ini dilandaskan oleh filsafat *post-positivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif (Sugiyono, 2012).

Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012). Objek dari penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam kegiatan Penataan Lingkungan Perkotaan Berbasis Komunitas Program Kota Tanpa Kumuh di Ponorogo.

Unit Analisis Penelitian

Yang menjadi unit analisis di dalam penelitian ini adalah berbagai pihak (*stakeholders*) yang bersinggungan langsung dengan program Kota Tanpa Kumuh yaitu pemerintah yang diwakili oleh Dinas PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya pihak swasta yang meliputi perbankan, perusahaan dan dari masyarakat meliputi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta tim Fasilitator.

Teknik Sampling/ Penentuan Informan Penelitian

Metode penentuan informan yang dilakukan adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu (Moleong, 2005). Penentuan informan sebagaimana dimaksud didasarkan atas karakteristik sebagai berikut :

- a. Informan merupakan pelaku/pelaksana PLPBK Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo Tahun 2018
- b. Informan bersikap objektif dan tidak memiliki kecenderungan untuk berlaku subjektif
- c. Informan memahami tema dan tujuan daripada penelitian.

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. *Informan* yang diambil dalam penelitian ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci sebanyak 3 (tiga) orang yang Lurah Banyudono Kabupaten Ponorogo, Ketua BKM Tirto Dono dan Asman Kotaku Ponorogo.

Untuk informan lainnya adalah merupakan program Kotaku khususnya dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Banyudono yang terdiri dari Faskel, Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola Sosial dan ketua Kelompok Swadaya Masyarakat. Namun demikian dalam penelitian ini jawaban informan akan diolah melalui metode Miles

Huberman sehingga untuk jawaban yang memiliki kesamaan akan ditampilkan salah satu jawaban saja.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi serta keterangan- keterangan yang di perlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan jenis datanya. Untuk data primer penelii menggunakan tehnik observasi dan wawancara mendalam selanjutnya untuk data sekunder digunakan tehnik kepustakaan dan dokumentasi.

Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Collaborative Governance yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sebuah proses yang melibatkan stakeholders mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat di dalam penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di dalam program Kota Tanpa kumuh di Kabupaten Ponorogo. Dimensi kolaborasi yang dipakai di dalam penelitian ini adalah proses kolaborasi diantaranya adalah : Dinamika Kolaborasi, Tindakan-Tindakan Kolaborasi, dan Dampak Sementara

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dalam Moleong (2005), yang mencakup tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung

selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian data. Setelah mereduksi data, hal selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Mengambil kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan memang telah dilakukan sejak klasifikasi data, namun kesimpulan tersebut masih diragukan. Hal itu dikarenakan data yang didapat masih minim dan belum lengkap. Tetapi dengan bertambahnya data yang diperoleh, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, sebab data-data tersebut semakin mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian.

Hasil Penelitian

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan didaerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan keinginan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (anggota BKM) tentang pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Banyudono sudah cukup baik, dimana masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, pelak-

sanaan pembangunan terealisasi maksimal karena dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Kegiatan fisik yang di kerjakan oleh masyarakat setempat didampingi oleh para ahli yang dalam hal ini adalah tim fasilitator agar hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat Banyudono di semua tahapan sangat baik dan bervariasi ini disebabkan juga oleh program yang bersentuhan dengan kepentingan mereka sendiri yaitu kaitannya dengan masalah lingkungan. Dalam hal itu masyarakat Banyudono telah memaksimalkan keterlibatannya berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan.

Sebagian masyarakat Kelurahan Banyudono, terlibat aktif dalam kegiatan program Kota Tanpa Kumuh dan kegiatan sosial, seperti dari musyawarah perencanaan program, pelaksanaan program, partisipasi dalam kelembagaan dan tahap monitoring dan evaluasi sebuah program. Dan sebagian masyarakat yang kurang terlibat aktif berada pada tipe partisipasi yang pasif.

Kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan program Kota Tanpa Kumuh sangatlah aktif, bisa dilihat dari beberapa kegiatan yang diadakan. Seperti musyawarah perencanaan program dan lainnya. Masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, seperti berswadaya atau bergotong royong. Dan aja pula masyarakat dalam fotum hanya mendengarkan dan menunggu hasil keputusan. Peran masyarakat dari mulai memutuskan, menjalankan program sampai tahap evaluasi dan monitoring terlibat aktif. Bisa dilihat dari setiap

pengawasan program yang sudah berjalan.

Partisipasi masyarakat Banyudono kebanyakan yaitu partisipasi dalam mengikuti acara musyawarah atau pertemuan warga hal ini dikarenakan bahwa pertemuan dilakukan di lingkungan atau di rumah warga sehingga memudahkan akses mereka semua. Dalam tahap sosialisasi baik wawancara maupun observasi menunjukkan adanya partisipasi yang maksimal dari masyarakat kelurahan Banyudono.

Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan melalui program PBPBK ada empat menyangkut masalah persampahan, drainase sanitasi dan jalan lingkungan semuanya ada KSM yang beranggotakan lebih dari lima belas orang. Kondisi tersebut juga turut serta mempengaruhi dan menjadi indikator daripada partisipasi masyarakat. Kelurahan banyudono menyumbang luasan sebesar 2.9 Ha wilayah kumuh. Kondisi permukiman berdekatan dengan pasar “krempyeng” di lahan PT.KAI, sampah serta limbah yang berasal dari aktivitas pasar di buang di area permukiman tanpa adanya kontribusi dan tanggung-jawab dari pihak pasar dan pedagang pasar. Hal tersebut tentunya diluar wewenang Dinas Pasar karena pada kenyataannya pasar “krempyeng” atau yang lebih di kenal dengan pasar stasiun ini berdiri bukan atas izin dinas yang bersangkutan.

Faktor Penghambat Program Kota Tanpa Kumuh bagi pengurangan tingkat kekumuhan lingkungan Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo melalui Penataan Lingkungan Permukiman

Berbasis Komunitas (PLPBK) sangat kecil tapi ada satu yang paling serius itu mengenai legalitas lahan. Jadi pada mulanya bukan di jalan biak Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) ini akan dilaksanakan tetapi di jalan nias di sekitaran pasar stasiun karena kepemilikannya masih menjadi hak milik PT. KAI Madiun sehingga ini gagal dari perencanaan. Faktor Pendukung Program KOTAKU pengurangan tingkat kekumuhan lingkungan Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo melalui Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) sangat baik, bisa dilihat dari peran masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program.

Penutup

Kesimpulan

1. Kondisi umum penataan lingkungan permukiman Kumuh di Kabupaten Ponorogo termasuk juga di kelurahan Banyudono memiliki karakteristik tingkat kekumuhan yang ringan sehingga pilihan penanganan kumuhnya adalah melalui pencegahan dan peningkatan kualitas. Program dan pola penanganan Kumuh di Kelurahan Banyudono telah disesuaikan dengan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk mengetahui proses kola-

borasi diketahui bahwa dinamika kolaborasi, tindakan – tindakan dan dampak sementara dari proses kolaborasi semuanya terdapat didalam keseluruhan proses kolaborasi. Pertama tentang dinamika dan proses tersebut tercermin di dalam partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa partisipasi masyarakat Banyudono dalam pengerjaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas Program Kota Tanpa kumuh dalam tahap persiapan sangat tinggi.

3. Tindakan kolaborasi yang dilakukan dalam tahap ini adalah keikutsertaannya dalam sosialisasi program serta aktif bertanya dan memberikan informasi terkait dengan masalah permukiman. Selain itu masyarakat juga mengundang fasilitator serta BKM dalam forum-forum yang dimiliki oleh warga masyarakat seperti arisan, yasinan dan lain sebagainya. Selanjutnya masyarakat juga terlibat aktif dalam Tim Inti Perencanaan partisipatif dan juga dalam *On The job Training* masyarakat secara sukarela menggali data dari warga masyarakat yang lain yang berkaitan dengan masalah permukiman. Dalam kaitannya dengan pekerjaan non fisik masyarakat juga terlibat baik secara swadaya maupun swadana. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan sepenuhnya masyarakat juga berpartisipasi secara aktif karena seluruh pekerjaan yang ada dikerjakan

oleh warga masyarakat. Dalam tahap pekerjaan fisik masyarakat juga berswadaya baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk konsumsi.

4. Dampak sementara yang dihasilkan dari adaptasi dan proses kolaborasi adalah terciptanya kondisi yang kondusif dimana semua pelaku pembangunan di dalam program Kota Tanpa Kumuh dapat berjalan beriringan melakukan kolaborasi sesuai bidang dan wewenangnya masing-masing. Terjadi job deskripsi antar pelaku kolaborasi baik dari pemerintah Kelurahan, stakeholders baik internal maupun eksternal serta seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat.
5. Faktor Penghambat Program Kota Tanpa Kumuh bagi pengurangan tingkat kekumuhan lingkungan Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo melalui PLPBK sangat kecil, hanya dari segi waktu dan kesiapan masyarakat saja yang menjadi penghambat. Adapun hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri pada faktor didalam masyarakat itu sendiri (*internal*), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (*eksternal*) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Tetapi juga ada penghambat yang membuat

pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) tidak sesuai perencanaan atau bergeser adalah mengenai legalitas lahan yang masih menjadi milik PT. KAI sehingga menyebabkan adanya satu titik yang dibatalkan. Sedangkan Faktor Pendukung Program Kota Tanpa Kumuh dalam upaya pengurangan tingkat kekumuhan lingkungan Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo melalui Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) sangat baik, bisa dilihat dari peran masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

- Ahmad. Sururi, 2017. Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). Jurnal Humanika. Vol.25 No.1 (2018) ISSN 1412-9418
- Amelia, Ira, Desmiyawati, dan Nur Azlina., 2014, "Pengaruh good governance, pengendalian intern, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada satuan kerja pemerintah kabupaten pelalawan)." Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi 1.1 : 1-15, Universitas Riau, Pekanbaru
- Ansell, C., dan Gash, A. 2008. Collaborative Governance in

- Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 18 (4), 543-571.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Pers
- Balogh, Stephen. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Denny. 2019. COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Diani Rintan Mirza. 2017. Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Jurnal Forum Ilmu Sosial* 44 (1), June 2017, pp. 43-54
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Irawan Deni. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017. ISSN 2303-341X
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kementerian Pekerjaan Unum. 2015. *Pedoman umum, KOTAKAU (Kota Tanpa Kumuh)*, Direktur Jendral Cipta Karya 2015
- Kota Tanpa Kumuh. 2017. *Dokumen RPLP Kotaku Ponorogo*. Direktur Jendral Cipta Karya 2017
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : remaja Rosda Karya.
- Mustafa, D. 2013, *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 2015. *Surat Keputusan Bupati Ponorogo Tahun 2014 Nomor: 188.45/ j100 /405.14/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Ponorogo*. Bapeda Ponorogo *Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jingglong*
- Rewansyah, Asnawi. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Yusaintanas Prima. Jakarta
- Rohman, Hermanto, Bagus Nuari Harmawan, Inti W. 2017. *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. *Jurnal E-SOSPOL*; Vol. IV Edisi 1; Jan-Apr 2017; hal 50–55
- Rohman, Wasati, Bagus. 2017. *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. *e-SOSPOL*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 50-55, oct. 2017. ISSN 2355-1798.

- Rosyida, Sri Yuliani, Gusti Putri. 2017. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 No 2, 2017 hlm 33 – 47
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Simbolon, Gratianus, Rintan Mirza, D. 2017. Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Jurnal Forum Ilmu Sosial* 44 (1), June 2017, pp. 43-54 ISSN 1412-971X (print), ISSN 2549-0745 (online)
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sudarmo, Tika Mutiarawati. 2017. Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 No 2, 2017 hlm 48 – 62
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta ; Rineka Cipta
- Tampubolon, M Saur. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Pendidik dan keilmuan*. Jakarta: Erlangga.
- Tarumon, Suardi Ade Masya Resa, Zulfan Saam, 2017. *Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru*. *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Juli 2017, p 117-127 ISSN 2356-2226. Volume 2 Nomor 2
- Yolanda, 2018. *Strategi Komunikasi Konsultan Manajemen Wilayah Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota*. *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1 – April 2018
- Zulyanti, 2017. *Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Ikom. Unlam.* 2017